

**KEPENTINGAN INDONESIA BERPARTISIPASI DALAM *ASEAN COAST  
GUARD FORUM* (ACGF)**

**Oleh: Aatifah Dhiyan Padmarini**  
**Dosen Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA**  
Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/ Fax: 0761-63277

***ABSTRACT***

*Indonesia as one of the archipelagic countries in Southeast Asia that has various maritime security dynamics has actively participated in maritime cooperation between coast guards called the ASEAN Coast Guard Forum (ACGF). Therefore, this paper will examine the factors driving Indonesia's participation in the ACGF represented by Bakamla RI despite being active in other maritime security cooperation.*

*To answer this question, we will use a qualitative method with data collection techniques through document analysis sourced from Bakamla RI, and supported by books, journals, articles, and other official documents. This research also uses the perspective of Neo-realism with the theory of Maritime Security and the concept of National Interest, which is related to defense interests.*

*The results of this paper show that Indonesia's interest in participating in the ACGF is due to maritime defense interests due to maritime security threats such as transnational crimes that appear in Indonesian waters and maritime defense as one of the pillars in Indonesia's vision, namely the vision of a world maritime axis.*

**Keywords:** *ASEAN Coast Guard Forum, Maritime Security, Interests, Bakamla RI, Participation.*

## PENDAHULUAN

Keamanan maritim merupakan salah satu isu yang telah menjadi pembahasan oleh negara-negara di dunia, termasuk negara-negara anggota ASEAN yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan faktor geografis Asia Tenggara itu sendiri yang diapit oleh dua samudera. Selain itu, perairan atau laut bagi negara anggota ASEAN juga menjadi salah satu media utama dalam kegiatan ekonomi global. Hal ini dibuktikan dengan jalur laut Asia Tenggara menjadi jalur laut teraktif di dunia, karena hampir sepertiga kegiatan perdagangan internasional terjadi di Selat Malaka<sup>1</sup>.

Sesuai dengan hukum laut internasional yakni UNCLOS 1982 turut mengatur mengenai kewajiban negara-negara untuk menjaga keamanan maritim. Menjaga keamanan dan stabilitas maritim dalam hal ini telah menjadi urgensi bagi negara-negara mengingat meluasnya sumber ancaman yang ada. Ancaman-

ancaman tersebut dapat berupa ancaman keamanan tradisional yakni mengenai batas antar negara terkait serta ancaman keamanan non-tradisional.<sup>2</sup>

Indonesia yang sangat berkepentingan terhadap kondisi laut dengan memiliki visi untuk menjadi poros maritim global menyadari adanya urgensi bagi negara untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim. Indonesia kemudian mengambil langkah untuk memegang peran aktif dalam pembentukan dan pelaksanaan *ASEAN Coast Guard Forum* (ACGF) sebagai bentuk realisasi dari upaya bersama tersebut.

ACGF menjadi salah satu langkah dan upaya konkret yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan ASEAN karena ACGF merupakan forum kerjasama multilateral yang didirikan oleh negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi antara badan-badan

---

<sup>1</sup> Solvay Gerke & Han-Dieter Everss, "Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia", *Jurnal Akademika Edisi* 81(1), (2011), hlm. 9-10.

---

<sup>2</sup> Dayu Medina & Dewi Enggriyeni, "Peranan Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan Maritim di Kawasan ASEAN", *Nagari Law Review* 5(2), (2022), hlm. 219.

penegak hukum maritim di kawasan<sup>3</sup>.

Indonesia juga memiliki lembaga yang melakukan patroli maritim yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang ditugaskan untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Disamping itu Bakamla RI juga mengambil inisiatif untuk melakukan diplomasi keamanan maritim dengan berbagai mitranya.<sup>4</sup> Hal ini dibuktikan dari inisiasi pertama Indonesia dalam pembentukan ACGF dengan hadirnya delegasi Indonesia yang menghadiri pertemuan perancangan pembentukan ACGF pada Januari 2018 di Manila, Filipina.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Wamenhan RI Sambut Baik Pertemuan Perdana ASEAN Coast Guard Forum*, (2022), <https://www.kemhan.go.id/2022/11/22/wamenhan-ri-sambut-baik-pertemuan-perdana-asean-coast-guard-forum.html>

<sup>4</sup> Shofian Nanda Adiprayoga, dkk, "Efektivitas Peran Bakamla dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai *Coast Guard* Indonesia", *Jurnal Keamanan Maritim* 6(2), (2020).

<sup>5</sup> Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, *Bakamla RI Dukung Pembentukan ASEAN Coast Guard Forum*, (2018), <https://setnasasean.id/siaran->

Namun, Indonesia yang telah mengikuti berbagai kerjasama untuk menanggapi isu keamanan maritim sebelum terbentuknya ACGF. Salah satunya adalah *ASEAN Maritime Forum* (AMF), di Selat Malaka juga terdapat *Malacca Strait Patrols* (MSP).<sup>6</sup> Serta *Head of Asian Coast Guard Agency Meeting* (HACGAM) yakni kerjasama antar *coast guard* yang melibatkan Bakamla RI juga dalam kerjasamanya.

Dengan berbagai kerjasama keamanan maritim yang sudah dibentuk sebelumnya, nyatanya ASEAN masih membentuk inisiatif lain yakni ACGF. Dalam hal ini Indonesia dapat dilihat menjadi negara yang berkontribusi aktif dalam ACGF. Sama halnya dengan Indonesia, meskipun sudah memiliki beberapa kerjasama dalam keamanan maritim kawasan Indonesia tetap mengambil langkah untuk berkontribusi aktif dalam ACGF. Pembahasan mengenai bagaimana motif Indonesia

---

<pers/read/bakamla-ri-dukung-pembentukan-asean-coast-guard-forum>

<sup>6</sup> Juliaene F. Putri, "Inisiatif MSP (*Malacca Straits Patrols*) dalam Menangani Ancaman Perompak di Selat Malaka", *JOM Fisip Unri* 3(2), (2016).

berpartisipasi aktif dalam *ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)* tentunya merupakan hal yang menarik untuk diteliti.

## KERANGKA TEORI

### Perspektif: Neo-realisme

Penelitian ini akan menggunakan perspektif neorealisme. Perspektif neorealisme oleh Kenneth Waltz menganggap bahwa fokus dasar negara adalah keamanan dan keberlangsungan hidup, maka tugas utama hubungan internasional adalah perdamaian dan keamanan. Dalam bukunya *Theory of International Politics*, Waltz berupaya untuk menjelaskan tentang sistem politik internasional yang berfokus pada struktur sistem dan interaksi antar unit-unit di dalamnya.<sup>7</sup>

Kaum realisme memang selalu menentang konsep regionalisme, namun neorealisme hadir untuk berpendapat bahwa terdapat dua faktor yang memicu timbulnya ‘*good neighbour*’ atau terbentuknya regionalisme di kawasan tertentu yakni adanya berbagai tekanan dari sistem

internasional serta peran dan fungsi hegemon.<sup>8</sup> Maka dalam perspektif ini sesuai dengan Indonesia dalam *ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)* yang tidak memiliki pengikat hukum dan menekankan konsep ‘*good neighbourhood*’.

### Teori: Keamanan Maritim

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori keamanan maritim. Teori keamanan maritim diadaptasi dari konsep keamanan (*security*) yang dipaparkan oleh Barry Buzan. Keamanan maritim sendiri dilihat sebagai hasil dari kombinasi antara tindakan preventif dan responsif yang diarahkan untuk penegak hukum dalam menjaga kawasan maritim dari ancaman-ancaman dan tindakan yang melanggar hukum.<sup>9</sup>

Keamanan maritim turut didefinisikan sebagai kondisi dimana suatu negara terbebas dari ancaman yang dapat mengganggu kepentingan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lutz Feldt, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele, *Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*. Berlin: Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW, (2013).

---

<sup>7</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, New York: McGraw Hill, (1979), hlm. 97

nasionalnya di laut.<sup>10</sup> Konsep keamanan maritim menurut pendapat Christian Bueger mengandung empat konsep keamanan yang terdiri dari: (1) keselamatan laut (*marine safety*), (2) kekuatan angkatan laut (*sea power*), (3) ekonomi laut (*blue economy*), dan (4) keamanan manusia (*human security*).<sup>11</sup>

### **Konsep: Kepentingan Nasional**

Dalam penelitian ini akan digunakan konsep kepentingan nasional, yang mana konsep ini kerap digunakan beberapa analis dalam studi hubungan internasional untuk menjelaskan dan mendeskripsikan perilaku suatu negara. Kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau adalah kapabilitas minimum negara untuk melakukan perlindungan terhadap negaranya dengan mempertahankan identitas, politik,

ataupun budayanya dari gangguan luar.<sup>12</sup>

Pembagian kepentingan dasar nasional ini digambarkan melalui 4 poin penting, yaitu: (1) Kepentingan Pertahanan (*Defense Interest*); (2) Kepentingan Ekonomi (*Economic Interest*); (3) Kepentingan Tatanan Dunia (*World Order Interest*); (4) Kepentingan Ideologis (*Ideological Interest*).<sup>13</sup>

### **Tingkat Analisa: Negara Bangsa**

Tingkat analisa merupakan target analisis agar peneliti mendapatkan gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*), dan perkiraan (*prediction*) yang akurat mengenai perilaku negara.<sup>14</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mohtar Mas'ood bahwa semua pembuat keputusan dimanapun mereka berada akan berperilaku sama ketika

---

<sup>10</sup> Mary Ann E Palma, Legal and Political Responses to Maritime Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore, *Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Papier No. 31*, (2009).

<sup>11</sup> Christian Bueger, What is Maritime Security?, *Marine Policy* 53, (2015).

---

<sup>12</sup> Arry Bainus & Junita B. Rachman, "Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional", *Intermestic: Journal of International Studies* 2(2), (2018), hlm. 109-115.

<sup>13</sup> Donald E. Nuechterlein, "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making", *British Journal of International Studies* 2(3), (1976), hlm. 246-266.

<sup>14</sup> Yessi Olivia, "Level Analisa Sistem dan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Transnasional* 5(1), (2013), hlm. 892.

menghadapi situasi yang sama.<sup>15</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika Keamanan Maritim Indonesia**

Indonesia telah diakui secara internasional sebagai sebuah negara kepulauan melalui UNCLOS 1982 yang kemudian turut diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki total luas wilayah laut sebesar 5,9 juta km<sup>2</sup>, hal ini akhirnya mengkategorikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.<sup>16</sup>

Indonesia memiliki wilayah-wilayah perairan yang dikatakan penting bagi negara karena dimanfaatkan dengan berbagai tujuan. Wilayah perairan ini disebut juga dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yakni adalah konsensus yang telah ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Dalam peraturan tersebut, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3

jalur ALKI. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki Indonesia dengan wilayah perairannya, maka perairan Indonesia memiliki nilai politik dan strategi keamanan tersendiri bagi negara lain.<sup>17</sup>

Tantangan dan ancaman yang dirasakan Indonesia dalam aspek maritim adalah munculnya kejahatan-kejahatan yang berbasis internasional atau melewati batas negara yang disebut sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional menjadi bagian dari kejahatan internasional yang memiliki dampak melampaui batas teritorial suatu negara, yang mana kejahatan ini dapat dilakukan oleh individu dan/atau kelompok.<sup>18</sup> Dalam hal ini, salah satu yang marak terjadi di Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan adalah penyelundupan narkoba, pembajakan kapal, dan penangkapan ikan ilegal.

Dengan potensi maritim

---

<sup>15</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, (1990), hlm. 41-48.

<sup>16</sup> Makmur Keliat, "Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13 (1), (2009), hlm. 111-129.

---

<sup>17</sup> Siti Merida Hutagalung, "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia", *Jurnal Asia Pacific Studies* 1(1), (2017).

<sup>18</sup> Roni G Raja Gukguk & Nyoman S P Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crimed", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(3), (2019).

Indonesia sebagai negara kepulauan dan tantangan ancaman kejahatan transnasional di laut telah mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Salah satu forum kerjasama maritim yang disertai Indonesia adalah *ASEAN Maritime Forum* (AMF) yang merupakan forum bagian dari ASEAN yang membahas terkait dialog kerjasama maritim negara-negara anggota ASEAN. AMF dibentuk pada tahun 2010 sebagai hasil dari salah satu pilar ASEAN.<sup>19</sup>

Di kawasan strategis sendiri yakni Selat Malaka, kerjasama pertama Indonesia di Selat Malaka adalah *Malacca Strait Patrols* (MSP). MSP merupakan hasil dari kerjasama keamanan antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selain itu, terdapat kerjasama maritim yang diikuti oleh Indonesia yang turut melibatkan *coast guard* yakni Bakamla RI seperti ACGF adalah *Head of Asian Coast Guard Agency Meeting* (HACGAM). Kerjasama ini merupakan kerjasama keamanan

maritim yang melibatkan *coast guard* masing-masing negara dengan lingkup se-Asia.<sup>20</sup>

### **ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) dan Keterlibatan Indonesia**

Ide membentuknya *ASEAN Coast Guard Forum* (ACGF) merupakan dari hasil pemikiran pada pertemuan *ASEAN Maritime Forum* (AMF) yang ke-5 pada tahun 2014. Dalam hal ini, beberapa negara merasakan bahwa perlunya sebuah kerjasama antara penjaga pantai negara-negara anggota ASEAN yang bertugas secara langsung di perbatasan-perbatasan perairan kawasan Asia Tenggara.<sup>21</sup>

Maka dari itu dilaksanakan pertemuan pertama perancangan ACGF yang disebut dengan *First Experts Group Meeting on the Establishment of ASEAN Coast Guard Forum* pada tanggal 19 Agustus – 20

---

<sup>19</sup> Najamudin Khairur Rijal, “Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF)”, *Indonesian Perspective* 3(2), (2018).

---

<sup>20</sup> Maudy Dwi Ramadhanti, “Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap HACGAM (Head of Asian Coast Guard Agency Meeting) Dalam Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia Tahun 2016-2017”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Universitas Riau* 6(1), (2019).

<sup>21</sup> Abel Josafat Manurung, “Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam *ASEAN Coast Guard Forum*”, *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 8(2), (2023), hlm 19.

Agustus 2015 tepatnya di Manila, Filipina. Pertemuan tersebut membahas berbagai kemungkinan dan peluang dari terbentuknya ACGF dan bagaimana *Terms of Reference* (ToR) yang akan diberlakukan.<sup>22</sup>

Diadakannya pertemuan perancangan kedua ACGF yaitu *The 2nd Experts Group Meeting on the Establishment of ASEAN Coast Guard Forum* pada tanggal 25 Januari - 26 Januari 2018 di Manila, Filipina. Pada pertemuan kedua inilah Indonesia terlihat pertama kali berpartisipasi aktif pada rancangan pembentukan ACGF dengan hadirnya delegasi Indonesia yakni pihak Badan Keamanan Laut RI.<sup>23</sup>

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober – 30 Oktober 2019, dilaksanakan kembali *3rd Experts Group Meeting on the Establishment of ASEAN Coast Guard Forum* yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Pertemuan ketiga merupakan

pertemuan yang ditujukan untuk melakukan finalisasi terhadap kerangka konsep dan *Terms of References* (ToR) yang sudah disusun pada dua pertemuan sebelumnya.<sup>24</sup>

Pertemuan resmi *ASEAN Coast Guard Forum* (ACGF) pertama kali pada tahun 2022. Pertemuan perdana ACGF ini dilaksanakan selama dua hari yakni dari tanggal 22 November – 23 November 2022 di Legian Kuta, Bali, Indonesia.<sup>25</sup> Selain terciptanya koordinasi dan pertukaran informasi, hasil dari pertemuan pertama dari *ASEAN Coast Guard* adalah disepakatinya *Bali Declaration for ASEAN Coast Guard 2022* yang merupakan inisiasi Indonesia.

Pada tahun 2023 dilaksanakan *ASEAN Coast Guard Forum 2023* yang terlaksana selama 3 hari tepatnya pada tanggal 6 Juni – 9 Juni 2023. Pelaksanaan pertemuan kedua ini turut

---

<sup>22</sup> ASEAN, *ASEAN Security Outlook 2015*, (2015).

<sup>23</sup> Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, *Bakamla RI Dukung Pembentukan ASEAN Coast Guard Forum*, (2018), <https://setnasasean.id/siaran-pers/read/bakamla-ri-dukung-pembentukan-asean-coast-guard-forum>

---

<sup>24</sup> Media Neliti, *Bakamla RI dan Forum Keamanan Laut ASEAN Pererat Sinergitas*, (2019), <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/26228/bakamla-ri-dan-forum-keamanan-laut-asean-pererat-sinergitas>

<sup>25</sup> Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, *ASEAN Coast Guard Forum 2022 hasilkan Deklarasi ASEAN CG*, (2022), [https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/asean-coast-guard-forum-2022-hasilkan-deklarasi-asean-cg](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/asean-coast-guard-forum-2022-hasilkan-deklarasi-asean-cg)

diinisiasi oleh Indonesia oleh karena itu ACGF 2023 turut dipimpin oleh Indonesia. Tahun 2024 turut dilaksanakan pertemuan utama ACGF yakni pada 4 Juni - 7 Juni 2024 yang berlokasi di Davao, Filipina. Selain itu turut dihadirkan mitra dari forum tersebut yakni *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC).<sup>26</sup>

### **Kepentingan Indonesia Melalui Partisipasinya di ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)**

#### **Kepentingan Pertahanan**

Kepentingan Indonesia yang berpartisipasi aktif dan bahkan dinilai memegang kepemimpinan dalam forum antar *coast guard* yang disebut dengan *ASEAN Coast Guard Forum* (ACGF) ini tentunya didasari oleh faktor Indonesia yang ingin mencapai keamanan maritim yang sepenuhnya. Keterlibatan Indonesia dalam ACGF memiliki sebuah kepentingan nasional dikarenakan sesuai dengan konsep kepentingan nasional yang dipaparkan oleh Nuechterllain yakni terkait kepentingan pertahanan.

Namun, sebelumnya sudah

terdapat beberapa kerjasama atau forum yang turut diikuti oleh Indonesia dalam hal maritim. Oleh karena itu bahwa dapat dilihat kepentingan pertahanan maritim baik secara nasional maupun regional menjadi faktor terkuat untuk Indonesia berusaha hingga saat ini agar tetap aktif dalam ACGF.

Dapat dikatakan bahwa kepentingan pertahanan maritim Indonesia dalam partisipasinya di ACGF sangat krusial. Selain itu, pertahanan maritim telah menjadi salah satu pilar dalam visi nasional yaitu visi poros maritim dunia serta menjadi hal penting bagi Indonesia mengingat ancaman yang kerap terjadi di Indonesia yakni kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, pembajakan kapal, dan *illegal fishing*.

- Pencegahan Kejahatan Transnasional Sebagai Pertahanan Maritim

Bukti nyata yang dapat dilihat dari adanya potensi pencegahan kejahatan transnasional melalui ACGF yakni dengan adanya

---

<sup>26</sup> ASEAN, *Joint Communique of the 57th ASEAN Foreign Ministers Meeting*, (2024).

koordinasi antar *coast guard* negara anggota ASEAN yang sepakat untuk mencapai kondisi laut yang aman dan tertera dalam *Bali Declaration for ASEAN Coast Guard 2022* tepatnya pada poin keempat yaitu: “Menyepakati untuk mewujudkan visi laut yang aman, damai, dan tentram di ASEAN” yang dapat menjadi *output* dari komitmen tersebut.<sup>27</sup>

Indonesia turut berupaya dalam menumbuhkan rasa saling percaya antar negara-negara ASEAN dengan meningkatkan kapasitas tersebut melalui *information sharing* dalam ACGF.<sup>28</sup> Dengan adanya pertukaran informasi dalam ACGF baik terkait insiden yang terjadi

dilaut maupun terkait penanganan dari masing-masing *coast guard* turut diharapkan dapat memberikan dampak positif yakni berkurangnya kasus-kasus kejahatan transnasional di Indonesia.

Salah satu bukti nyata lainnya keberhasilan ACGF yang memberikan penguatan pada penjagaan keamanan maritim Indonesia untuk pencegahan kejahatan transnasional adalah keberhasilan penyelesaian pelanggaran wilayah. Berdasarkan Laporan Kinerja Bakamla RI Triwulan II Tahun 2023, terjadi beberapa nelayan terbawa arus ke laut perairan negara lain karena cuaca, seperti adanya dua nelayan Indonesia yang terbawa arus ke perairan Malaysia dan terdapat kapal seorang nelayan yang berasal dari Sulawesi Tenggara ditangkap oleh pihak militer Papua Nugini. Kedua kasus tersebut berhasil terselesaikan

---

<sup>27</sup> Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, *ASEAN Coast Guard Forum 2022 hasilkan Deklarasi ASEAN CG*, (2022), [https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/asean-coast-guard-forum-2022-hasilkan-deklarasi-asean-cg](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/asean-coast-guard-forum-2022-hasilkan-deklarasi-asean-cg)

<sup>28</sup> Abel Josafat Manurung, “Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam *ASEAN Coast Guard Forum*”, *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 8 (2), (2023).

dengan baik karena hasil koordinasi dan komitmen yang terjalin antara Bakamla RI yang turut tergabung dalam ACGF.<sup>29</sup>

Selain itu, pencegahan kejahatan transnasional yang spesifik membahas kejahatan penyelundupan narkoba dilakukan melalui ACGF yakni pada pertemuan ACGF Tahun 2024 di Filipina yang telah menghadirkan *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC). Dalam pertemuan tersebut, UNODC dihadirkan sebagai salah satu mitra ASEAN untuk menampung dan menganalisa terkait kejahatan-kejahatan transnasional yang terjadi di perairan kawasan, termasuk di perairan Indonesia..<sup>30</sup>

Patroli maritim melalui ACGF telah menjadi salah satu implementasi kerjasama untuk

penanganan kejahatan transnasional dalam konteks kepentingan Indonesia terkait ancaman penangkapan ikan secara ilegal. Dalam hal ini ACGF juga menjadi forum yang dapat memberikan Indonesia peluang dalam mengurangi kejahatan tersebut.

- Pertahanan Maritim Sebagai Salah Satu Pilar Visi Poros Maritim Dunia

Dalam menganalisis kepentingan Indonesia berpartisipasi aktif dalam ACGF, kepentingan strategis mengenai peran kepemimpinan dalam ASEAN untuk mencapai visi poros maritim dunia juga menjadi faktor pendorong bagi Indonesia dalam perannya di ACGF. Gagasan Poros Maritim Dunia dihadirkan dengan 5 unsur atau pilar pembangunan didalamnya yakni: (1) budaya maritim; (2) ekonomi maritim; (3) konektivitas maritim; (4)

---

<sup>29</sup>Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Bakamla RI Triwulan II Tahun 2023*, (2023), <https://bakamla.go.id/publication/report>

<sup>30</sup> ASEAN, *Joint Communique of the 57th ASEAN Foreign Ministers Meeting*, (2024).

ketahanan maritim; (5) diplomasi maritim.<sup>31</sup>

Sejak saat visi poros maritim dunia ini telah menjadi suatu visi nasional yang perlu dicapai oleh Indonesia dengan memenuhi pilar-pilar yang merupakan penegak dari visi tersebut. Indonesia turut meneruskan perannya dalam ACGF sebagai upaya meningkatkan keamanan maritim yang turut sejalan dengan unsur visi Poros Maritim Dunia tepatnya pada poin 4 yakni ketahanan maritim melalui diplomasi maritim.

Hal tersebut tentunya menjadi suatu hal yang positif terhadap upaya tercapainya visi poros maritim dunia khususnya dalam pilar pertahanan maritim. Dengan Indonesia yang memegang peran penting di kawasan, maka akan membuka peluang lebih bagi

Indonesia untuk melebarkan jejaring kerjasamanya secara internasional demi mencapai keamanan maritim yang diinginkan sehingga visi tersebut akan benar-benar direalisasikan. Maka, ACGF ini turut menjadi alat Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya dengan diplomasi dan kerjasama regional melalui Bakamla RI.

Selain itu, partisipasi Indonesia dalam ACGF secara tidak langsung turut memperkuat Indonesia dalam diplomasi maritimnya yang sesuai dengan pilar ke-5 dalam visi poros maritim dunia. Keanggotaan Indonesia dalam ACGF turut memberikan Indonesia kesempatan untuk membangun hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam konteks yang lebih konstruktif dan menguntungkan.

Telah dipaparkan pada Laporan Kinerja Bakamla RI Tahun 2023 yang menyatakan

---

<sup>31</sup> Poltak Partogi Nainggolam, "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya", *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 6(2), (2016).

bahwa secara khusus upaya diplomasi maritim yang dilakukan untuk menguatkan kesetaraan posisi Indonesia dengan *coast guard* negara-negara ASEAN lainnya sebagai upaya pertahanan maritim melalui diplomasi di ACGF. Dengan upaya diplomasi tersebut, pencapaian kerjasama internasional terpenuhi 333% dari target tahun 2023, salah satunya melalui ACGF.<sup>32</sup>

## SIMPULAN

ACGF sebagai forum kerjasama antar *coast guard* (penjaga pantai) mengutamakan terbentuknya koordinasi antar negara ASEAN dalam hal pengawasan dan pelaksanaan hukum laut secara regional oleh *coast guard* antar negara ASEAN. Indonesia sebagai negara kepulauan yang didominasi oleh perairan dengan dinamika maritimnya yang rentan, menyadari perlunya kerjasama

keamanan maritim yang maksimal. Oleh karena itu Indonesia turut mengikuti ACGF dan bahkan mendominasi meskipun Indonesia sudah melakukan kerjasama keamanan maritim lainnya seperti AMF, MSP, dan HACGAM.

Dalam forum ini Indonesia diwakilkan oleh Bakamla RI sebagai *coast guard* Indonesia dalam melakukan dialog di ACGF. Indonesia dinilai sangat aktif dalam berpartisipasi di ACGF baik dalam perancangan maupun pelaksanaan serta beberapa kali menjadi pemandu dan tuan rumah dalam pertemuan ACGF serta memberikan ide-ide baru dalam kerjasama tersebut. Oleh karena itu dianalisis terkait mengapa Indonesia sangat aktif berpartisipasi di ACGF melalui padahal sudah ada kerjasama keamanan maritim lainnya. Dianalisis bahwa Indonesia tentunya memiliki kepentingan pertahanan yang menjadi kepentingan dasar nasional tiap-tiap negara, dalam hal ini kepentingan keamanan maritim.

Dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang lebih spesifik bagi Indonesia berpartisipasi dalam ACGF

---

<sup>32</sup> Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laporan Kinerja Bakamla RI Tahun 2023, (2024), [https://bakamla.go.id/uploads/ppid/Final\\_LKj\\_Bakamla\\_RI\\_2023\\_Final\\_LHR\\_Inspektorat28022024\\_1.pdf](https://bakamla.go.id/uploads/ppid/Final_LKj_Bakamla_RI_2023_Final_LHR_Inspektorat28022024_1.pdf)

yakni untuk kepentingan pertahanan, yang mana Indonesia belum ada kerjasama antar penjaga pantai yang hanya berfokus pada kawasannya yakni Asia Tenggara. Kepentingan pertahanan ini turut didorong oleh dua faktor yaitu *pertama*, pencegahan kejahatan transnasional sebagai pertahanan maritim. Dalam hal ini, Indonesia memanfaatkan ACGF untuk melakukan koordinasi dengan *coast guard* ASEAN lainnya melalui komitmen, kepercayaan, dan pertukaran informasi demi pencegahan kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perairannya. *Kedua*, pertahanan maritim sebagai salah satu pilar visi poros maritim dunia. Dengan adanya penguatan pertahanan maritim melalui ACGF, Indonesia turut dapat memperkuat salah satu pilar yang terdapat dalam visi nasionalnya yaitu visi poros maritim dunia..

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Cipto, Bambang. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Belajar. (2007).
- Feldt, Lutz.,Roell, Dr. Peter.,Thiele, Ralph D. *Maritime Security –*

*Perspectives for a Comprehensive Approach.* Berlin: Institut für Strategie-Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung ISPSW. (2013).

Keohane, Robert O. *Neoliberal Institutionalism: a Perspective in World Politics, Essays in International Institutions and State Power.* New York: Routledge. (1989).

Mas'ood, M. Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan metodologi. Bandung: LP3ES. (1990).

Nainggolan, Poltak P., Muhamad, Simela Victor., & Hidriyah, Sita. *Kerjasama Internasional Melawan Terorisme.* Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2019).

Perwita, AA Banyu., Yani, Yanyan Mochamad. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2005).

Puspitawati, Diana. *Hukum Laut Internasional.* Jakarta: Prenadamedia Group. (2017).

Waltz, Kenneth. *Theory of International Politics.* New York: McGraw Hill, (1979).

### Jurnal:

Adiprayoga, S. N., & Octavian, A. Efektivitas Peran Bakamla Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Coast Guard Indonesia. *Keamanan*

- Maritim*, 6(2). (2020): 182-202.
- Arif, W., & Yanto, A. Konsep Makna Keamanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 10(3). (2022): 227-234.
- Asmar, Y., Apriyanto, I. N. P., Prakoso, L. Y., Taufik, R. M., Ansori, A., Parwata, I. N., & Purwantoro, S. A. (2023). Kebijakan Poros Maritim Dunia Dihadapkan dengan Undang-Undang No. 32 Th. 2014 dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8). (2023): 3305-3318.
- Bainus, A., Rachman, J. B. Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies* 2(2). (2018): 109-115.
- Busthomi, M Ali. Mekanisme ASEAN Regional Forum dalam Menangani Isu Terorisme Regional. *Jurnal Review Politik* 2(1). (2012): 80-98.
- Bueger, Christian. What is Maritime Security?. *Marine Policy* 53. (2015): 159-164.
- Emmers, Ralf. "Indonesia's role in ASEAN: A case of incomplete and sectorial leadership." *The Pacific Review* 27(4). (2014): 543-562.
- Gerke, S., & Evers, H. D. Selat Melaka: Jalur sempit perdagangan dunia. *Akademika*, 81(1). (2011): 5-14.
- Gukguk, Roni G. R., & Nyoman S P Jaya, Nyoman S. P. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crimed. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(3). (2019): 337-351.
- Hadiningrat, J. K. Diplomasi maritim: meletakkan fondasi poros maritim dunia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(1). (2020): 98-109.
- Haffsari, Peggy. P., & Kurniawan, Yandry. Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan. *Sospol* 4(1). (2018): 55-77.
- Haryanto A., & Saadah, K. Persepsi Pemimpin Negara Terhadap ASEAN dan Inisiatif Indonesia di Kawasan Asia Tenggara. *Prosiding Senaspolhi* 5(1). (2023).
- Hutagalung, S. M. Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies* 1(1). (2017): 75-91.
- Ilham, M., Nur, Nirwan M., & Hipan, Nasrun. Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Yustisiabel* 6(1). (2022): 55-69.

- Keliat, Makmur. Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13(1). (2009): 111-129.
- Kusmanto, Heri. Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2(1). (2014): 78-90.
- Manullang, A. J. Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Coast Guard Forum. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2). (2023): 18-30.
- Medina, D., & Enggriyeni, D. Peranan Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Di Kawasan Asean. *Nagari Law Review*, 5(2). (2022): 218-227.
- Muhamad, Simela V. Illegal Fishing di Peraian Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. *Jurnal Politica Dinamik Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 3(1). (2016).
- Muhamad, Simela V. Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 6(1). (2016).
- Nainggolan, Poltak P. Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 6(2). (2016): 167-190.
- Navari, Cornelia. (2016). Hans Morgenthau and the National Interest. *Ethic & International Affairs*, 30(1). (2016).
- Nuechterllein, Donald E. National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making. *British Journal of International Studies* 2(3). (1976).
- Oktavian, Risky. Rezim Keamanan Maritim dalam Penanganan Pembajakan Kapal di Selat Malaka. *Jurnal Asia Pacific Studies* 5(1). (2021): 61-90.
- Olivia, Yessi. Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Transnasional*, 5 (1). (2013): 809-907.
- Palma, Mary Ann E. Legal and Political Responses to Maritime Security Challenges in the Strait of Malacca and Singapore. *Canadian Consortium on Asia Pacific Security (CANCAPS) Papier* No. 31. (2009).
- Putri, Julane F. Inisiatif MSP (Malacca Straits Patrols) dalam Menangani Ancaman Perompak di Selat Malaka.

- JOM Fisip Unri* 3(2). (2016).
- Ramadhanti, Maudy D. Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap HACGAM (Head of Asian Coast Guard Agency Meeting) Dalam Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia Tahun 2016-2017. *JOM Fisip Unri* 6(1). (2019): 1-12.
- Ridho, Muhammad., & Sudirman, Arfin. Signifikasi Keamanan Maritim di ASEAN. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 3(2). (2020): 165-182.
- Rijal, N.K. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF). *Indonesian Perspective* 3(2). (2018): 159-179.
- Risdianto, D. Kedaulatan Wilayah Udara di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8(2). (2019).
- Sagena, Uni W. Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-Isu dan Interaksi Antar Aktor. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 1(1). (2019): 72-91.
- Saputra, Angga F., Prasetyo, Yogo. Upaya Bakamla Melaksanakan Operasi Keamanan Laut di Selat Malaka. *DEFENDONESIA* 6(2). (2022): 22-31.
- Singer, J. D. The level-of-analysis problem in international relations. *World Politics*, 14(1). (1961): 77-92.
- Sugiyono, S. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. *Google Scholar Alfabeta*. (2013).
- Suproboningrum, Lintang. Peran Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinansi Indonesia-Malaysia-Singapura Untuk Menekan Angka Pembajakan dan Perompakan Laut di Selat Malaka. *Jurnal Hubungan Internasional* 11(1). (2018): 19-38.
- Syahdani, Muwalliha. Regionalisme dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Sebuah Perspektif. *Jurnal Pena Wimaya* 1(1). (2021).
- Wimanora, A. Upaya Indonesia dalam Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). *JOM FISIP Unri* 9. (2022): 27-35.
- Dokumen Resmi:**
- ASEAN. *ASEAN Security Outlook 2015*. (2015). <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ASEAN-SECURITY-OUTLOOK-2015.pdf>
- ASEAN. *Joint Communique 48th ASEAN Foreign Ministers*

*Meeting Kuala Lumpur, Malaysia.* (2015).  
[https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/August/48th\\_amm/JOINT%20COMMUNIQUE%20OF%20THE%2048TH%20AMM-FINAL.pdf](https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/August/48th_amm/JOINT%20COMMUNIQUE%20OF%20THE%2048TH%20AMM-FINAL.pdf)

ASEAN. *Joint Communique of the 57th ASEAN Foreign Ministers Meeting.* (2024).  
<https://asean.org/wp-content/uploads/2024/07/Final-Joint-Communique-of-the-57th-AMM.pdf>

ASEAN Regional Forum. *Co-Chairs Summary Report 10th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security.* (2018).  
<https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2019/Co-Chairs-Summary-Report-of-10th-ARF-ISM-on-MS-final-ii.pdf>

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. *Laporan Kinerja (LKJ) Bakamla RI Tahun 2022.* (2023).  
[https://bakamla.go.id/uploads/pid/LKJ\\_BAKAMLA\\_RI\\_TAHUN\\_2022.pdf](https://bakamla.go.id/uploads/pid/LKJ_BAKAMLA_RI_TAHUN_2022.pdf)

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Bakamla RI 2023.* (2024).  
[https://bakamla.go.id/uploads/pid/Final\\_LKj\\_Bakamla\\_RI\\_2023\\_Final\\_LHR\\_Inspektorat28022024\\_1.pdf](https://bakamla.go.id/uploads/pid/Final_LKj_Bakamla_RI_2023_Final_LHR_Inspektorat28022024_1.pdf)

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. *Laporan Kinerja*

*Bakamla RI Triwulan II Tahun 2023.* (2023).  
[https://bakamla.go.id/uploads/pid/LKj\\_Bakamla\\_RI\\_Periode\\_Triwulan\\_I\\_Tahun\\_2023\\_ttd.pdf](https://bakamla.go.id/uploads/pid/LKj_Bakamla_RI_Periode_Triwulan_I_Tahun_2023_ttd.pdf)

Indo-Pacific Defense Forum. *ASEAN Coast Guard Forum Strengthens Cooperation to Combat Maritime Threats.* (2023).  
<https://ipdefenseforum.com/2023/06/asean-coast-guard-forum-strengthens-cooperation-to-combat-maritime-threats/>

#### Internet:

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. *ASEAN Coast Guard Forum 2022 hasilkan Deklarasi ASEAN CG.* (2022).  
[https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/asean-coast-guard-forum-2022-hasilkan-deklarasi-asean-cg](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/asean-coast-guard-forum-2022-hasilkan-deklarasi-asean-cg)

Kementrian Luar Negeri. *Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN.* (2015).  
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/view/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean#>

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Wamenhan RI Sambut Baik Pertemuan Perdana ASEAN Coast Guard Forum.* (2022).  
<https://www.kemhan.go.id/2022/11/22/wamenhan-ri-sambut-baik-pertemuan-perdana-asean-coast-guard-forum.html>

Media Neliti. *Bakamla RI dan Forum*

*Keamanan Laut ASEAN Pererat Sinergitas.* (2019).  
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/26228/bakamla-ri-dan-forum-keamanan-laut-asean-pererat-sinergitas>

*Phillipine Coast Guard. PCG hosts First Expert's Group Meeting on ASEAN Coast Guard Forum.* (2015).  
<https://coastguard.gov.ph/index.php/149-news/news-2015/923-pcg-hosts-first-expert-s-group-meeting-on-asean-coast-guard-forum>

Puspen TNI. *Bakamla RI Beserta Negara ASEAN Sepakati Draf Pembentukan ASEAN Coast Guard Forum.* (2023).  
<https://tni.mil.id/view-227038-bakamla-ri-beserta-5-negara-asean-sepakati-draf-pembentukan-asean-coast-guard-forum-acf.html>

Puspen TNI. *Bakamla RI Dukung Pembentukan ASEAN Coast Guard Forum.* (2018).  
<https://tni.mil.id/view-125606-bakamla-ri-dukung-pembentukan-asean-coast-guard-forum.htm>

Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. *Bakamla RI Dukung Pembentukan ASEAN Coast Guard Forum.* (2018).  
<https://setnasasean.id/siaran-pers/read/bakamla-ri-dukung-pembentukan-asean-coast-guard-forum>

*The City Post. ASEAN Coast Guard*

*Forum held in Davao.* (2024).  
<https://thecitypost.net/asean-coast-guard-forum-held-in-davao/>

Website Tentara Nasional Indonesia. *Bakamla RI Persiapkan ASEAN Coast Guard Forum Tahun 2024.* (2022).  
<https://tni.mil.id/view-240402-bakamla-ri-persiapkan-asean-coast-guard-forum-tahun-2024.html>